

**PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI BATANG BAYANG DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata-I
pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas*

Oleh:

RIZKI OKTA SRIWAHYUNI

1710922069

Pembimbing :

Prof. Dr. BAMBANG ISTIJONO, M.E.

Ir. SRI UMIATI, M.T.



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak selalu berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. Isu pembebasan lahan menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini adalah pembangunan jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi Batang Bayang Kabupaten Pasaman Barat merupakan jaringan irigasi yang pada awal pembangunannya berasal dari Bendung Batang Bayang. Dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional pemerintah melakukan pembangunan serta rehabilitasi pada jaringan irigasi batang bayang agar dapat mengaliri 6.500 Ha aliran irigasi. Untuk merealisasikan pekerjaan tersebut pemerintah memerlukan lahan yang sangat luas, sehingga diperlukan kegiatan pengadaan tanah untuk mendapatkannya.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah memiliki banyak tahapan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan dengan pengumpulan data observasi,

dokumentasi, dan wawancara baik dengan masyarakat maupun instansi terkait, disimpulkan bahwa: [1] Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 [2] Dalam Pelaksanaannya, kegiatan Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang menghadapi beberapa kendala, tetapi dapat diselesaikan dengan mengambil beberapa tindakan yang disesuaikan dengan kendala tersebut.

Kata kunci Infrastruktur, Pengadaan Tanah, UU No. 2 Tahun 2012

